DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Abullah Abdul Husain. 2004. Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan. Terj.

 M.Irfan Syofwani. (Yogyakarta: Magistra Insania Press)
- Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Atmoko, Tjipto. 2011. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Unpad, Bandung
- Baldric Siregar. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2. Yogyakarta: UPP
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT Prestasi
 Pustakaraya
- Erlina, dkk. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP.No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzani, dkk. (2021). Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 171–181.
- Insani, Istyadi. 2010. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Organisasi Pemerintah. Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bandung.

- Laksmi, Fuad dan Budiantoro. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penerbit Pernaka.
- Mamesah D, J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moekijat. 2008. Administrasi Perkantoran. Bandung: Mandar Maju
- Mulyadi. (2018). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah- Perda 6 tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
 Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Walikota Padang . Nomor 78 Tahun 2016. Tentang. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja. Dinas Perhubungan
- Sailendra, Annie. 2015. Langkah-langkah raktis Membuat SOP. Yogyakarta: Trans Idea Publishing.
- Sukmadian. (2017). Manfaat Prosedur dalam kegiatan Ekspor Impor Kepabeanan, 6(831), 16
- Syafril, 2000. Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi. Jakarta: Bumi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 28 Tahun 2009. Tentang. Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

